

**KOALISI PARTISIPASI AKTOR DALAM JARINGAN IMPLEMENTASI PROGRAM
KELUARGA HARAPAN DI KOTA MAKASSAR****THE COALITION OF ACTOR PARTICIPATION IN THE IMPLEMENTATION NETWORK OF
THE HARAPAN FAMILY PROGRAM IN MAKASSAR CITY**

Mita Arnika¹
STISIP 17-8-1945
Makassar, Indonesia¹
email:
arnikamita01@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan *Coalition* (Koalisi) yang merupakan dimensi bagian dari *Theory Discourse Communication Networking* yang di gunakan untuk menganalisis Jaringan Implementasi Program Keluarga Harapan di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi. Data dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa interaksi sosial aktor yang berkepentingan dalam proses penjarangan dan penentuan pelaksanaan Program Keluarga Harapan pembentukan koalisi tidak menunjukkan adanya keadaan yang berbeda. Pada sebagian koalisi, interaksi sosial aktor lebih didominasi sumber daya manusia yang ditugaskan langsung oleh Kementerian Sosial. Hal tersebut dibuktikan pada pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan yang diusung koalisi langsung dari Kementerian Sosial. Namun koalisi yang terjadi menunjukkan interaksi sosial antar aktor yang seimbang dan dinamik. Aktor yang berkepentingan di anatar instansi sedikit cenderung ideologis. Sebaliknya aktor yang berpartisipasi langsung ke masyarakat cenderung pragmatik. Dalam konteks ini, kesamaan ideologi pada koalisi sumber daya manusia Program Keluarga Harapan tidak menjamin pembentukan koalisi berangkat dari motivasi yang sama. Namun, pada koalisi aktor yang berpartisipasi langsung terlibat dilapangan yang secara ideologi berbeda, justru didorong motivasi yang sama. Dari penelitian ini juga, dapat ditemukan konsep baru berupa pola interaksi sosial yang berbeda antara aktor yang berkepentingan dan aktor yang berpartisipasi langsung ke masyarakat, yaitu interaksi internal, eksternal dan interaksi sosial eksternal-internal.

Kata Kunci: Koalisi Aktor, Jaringan Kebijakan, Diskursus Komunikasi.

Abstract: This study aims to explain the Coalition which is the dimension of the Discourse Communication Networking Theory which is used to analyze the Implementation Network for the Family Hope Program in Makassar City. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, documentation and observation. The data were analyzed by data reduction techniques, presenting the conclusion drawing data. The results of the study revealed that the social interactions of actors with an interest in the process of screening and determining the implementation of the Family Hope Program in the formation of coalitions did not show any different circumstances. In some coalitions, the social interaction of actors is dominated by human resources assigned directly by the Ministry of Social Affairs. This is evidenced in the implementation of the Family Hope Program policy which was carried out by a direct coalition from the Ministry of Social Affairs. However, the coalition that occurs shows a balanced and dynamic social interaction between actors. Interested actors between agencies tend to be a little ideological. On the other hand, actors who participate directly in society tend to be pragmatic. In this context, the ideological similarity in the Human Resources Coalition of the Family Hope Program does not guarantee that the formation of a coalition departs from the same motivation. However, in the coalition of actors who participate directly in fields that are ideologically different, they are driven by the same motivation. From this research, new concepts can be found in the form of different patterns of social interaction between interested actors and actors who participate directly in society, namely internal, external and external-internal social interactions.

Keywords: Actor Coalition, Policy Network, Communication Discourse.

IJI Publication
p-ISSN: 2774-1907
e-ISSN: 2774-1915
Vol. 2, No. 2, pp. 80-85
Maret 2022



Unit Publikasi Ilmiah
Intelektual Madani
Indonesia

PENDAHULUAN

Terjadinya pergeseran paradigma satu ke paradigma lain, bukan tanpa sebab. Setiap kali munculnya paradigma baru, tentu ada masalah dengan paradigma sebelumnya. Thomas Khun dalam (Nurkhalis, 2012) menjelaskan bahwa apabila sepanjang karya yang dihasilkan termasuk teori yang

berakumulasi pada dukungan terhadap paradigma, maka ilmu pengetahuan tersebut berada pada kondisi normal (normal science). Tetapi apabila di suatu masa ditemukan karya-karya yang membuahkan penyimpangan yang tidak dapat dijelaskan dengan paradigma yang ada, maka kondisi inilah disebut *anomalies*. Kondisi *anomalies* ini kemudian membuat

orang tidak lagi percaya pada paradigma yang ada dan berusaha membangun paradigma baru. Ketika orang mulai tidak percaya dengan paradigma lama, dan berusaha menemukan/membangun dan beralih ke paradigma baru, maka kondisi inilah yang oleh Thomas Khun (1993) dalam (Nurkhalis, 2012) disebut sebagai “Revolusi Sains”. Setelah revolusi orang akan menemukan paradigma baru dengan dukungan teori-teori baru, maka ilmu yang bersangkutan kembali ke kondisi normal. Perkembangan administrasi publik merupakan suatu kajian dalam paradigma, memiliki ciri khas yang fokus dan lokusnya sangat diperhatikan untuk diterapkan, pentingnya suatu organisasi, membentuk suatu jaringan guna pencapaian suatu tujuan secara kerja sama, dari hasil penelitian organisasi cenderung membahas membangun komunikasi yang efektif dan efisien di antara para aktor yang berpartisipasi, interaksi merupakan hal penting dalam menjalankan kerja sama dengan pihak pihak tertentu.

Pentingnya pemahaman kebijakan publik dalam ilmu administrasi publik menjadi fokus utama membangun relasi dan interaksi sosial yang harus dipahami oleh setiap aktor yang berkepentingan yang berfungsi dinamis sehingga ternilai efisien dan efektif dalam menjalankan tugas pemerintahan, Dwiyanto 2007 dalam (Siti Maryam Neneng, 2016), kebijakan publik yang berkepentingan orang banyak di fokuskan pada pelayanan publik didalam birokrasi pemerintahan, berbicara tentang pelayanan publik tentunya menyangkut program program pemerintahan yang sering terjadinya permasalahan permasalahan yang ada pada aktor atau pelaku yang berhubungan langsung dengan program tersebut pada pembahasan ini, dapat mengungkap permasalahan permasalahan apa yang telah terjadi, apakah bisa diselesaikan dengan bijak, serta apa dampaknya, Implementasi program kebijakan keluarga harapan, mengentaskan permasalahan yang

terjadi dimasyarakat, tentunya menjadi hal penting bagi para aktor antar jaringan/instansi untuk menyelesaikan permasalahan permasalahan yang terjadi, oleh karna itu kerja sama antar organisasi secara signifikan harus efektif dan efisiensi dalam membangun relasi dan interaksi komunikasi yang baik.

Koalisi yang terjadi antar pelaku/aktor yang berpentingan tidak berdampak buruk bagi program pemerintahan yang sasarannya pada masyarakat, menghasilkan apakah program tersebut berhasil atau tidak, namun pada penelitian ini nantinya akan mengungkap koalisi yang terjadi antar aktor yang berkepentingan, interaksi yang terbentuk antara kolaboratif yang berdampak pada masyarakat.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif dimana penulis menggunakan wawancara, observasi langsung ke lapangan dan analisis bahan-bahan tertulis berbagai sumber data utama, dilaksanakan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Fokus penelitian bertujuan untuk mempertajam penelitian serta mengembangkan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah *Discoerse Communication Analys Network* dalam Implementasi program kebijakan keluarga harapan yang berfokus pada indikator koalisi partisipasi aktor dalam jaringan Implementasi program keluarga harapan di Kota Makassar yang melibatkan beberapa instansi dalam aktor yang terlibat di dalamnya. Dalam menganalisis data penulis menggunakan reduksi data pada hasil wawancara langsung pada penelitian ini, verifikasi data yang, serta menyajikan data singkat dari hasil penelitian tersebut.

HASIL DAN DISKUSI

Program Keluarga Harapan merupakan program nasional pemerintah di dalam implemetasi dan pelaksanaan program tidak

semua daerah sama pelaksanaan teknis masing masing kebijakan hal ini menimbulkan perubahan perubahan kebijakan terdapat koalisi advokasi, hal ini perlu kita juga pahami bahwa koalisi advokasi disebabkan oleh perubahan perubahan ekstrenal yang memungkinkan redistribusi kekuasaan yang menyerupai sistem kepercayaan seseorang atas orang orang lain (Weible, Sabatier, and Mcqueen, 2009; Sabatier and Jenkins-Smith, 2007; Flora et al, 2007; Sabatier, 1991, dalam Aslinda). Koalisi-koalisi aktor dari pemerintah menggunakan sumber daya manusianya untuk memperjuangkan *policy core beliefs*-nya dan meralisasikan tujuan-tujuan kebijakannya (Sabatier & Jenkins-Smith, 1999; Weible & Sabatier, 2007). Dalam perspektif teoritis ACF, (Sabatier & Jenkins-Smith, 1999; Weible & Sabatier, 2007). Sumber daya yang dimiliki dan yang digunakan oleh pemerintah Kota Makassar disesuaikan dengan tahapan proses implementasi program keluarga harapan yang merupakan proses pendampingan seperti halnya (1) Adanya pelayanan pendampingan dari pihak *save the childrent* pada kasus anak yang dialami oleh KPM, (2). Bentuk lain dari dukungan politik, (3) Informasi, pengetahuan dan Keterampilan, Urutan penyebutan sumber daya di atas tidak mencerminkan kepentingan relatifnya karena semua sumber daya dianggap mempunyai kelebihan tertentu dan digunakan pada momentum yang berbeda. Sumber daya Manusia penting yang digunakan oleh koalisi pemerintah untuk memperjuangkan *policy core belief* dalam kebijakan pemanfaatan ruang pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH). Penggunaan sumber daya manusia terlihat dalam kebijakan pemerintah dalam Program Keluarga Harapan dilihat dari pelayanan pelayanan yang tersedia dalam tahap pembuatan keputusan kebijakan.

Jaringan Implementasi Program Keluarga Harapan berhasil ketika permasalahan yang timbul dapat diselesaikan dengan memahami kerangka advokasi koalisi

atau *Advocacy Coalition Framework (ACF)* merupakan suatu kerangka kerja kebijakan yang dikembangkan untuk menangani masalah kebijakan publik yang intens (Sabatier dan Jenkins-Smith 1988, 1993). Kerangka merupakan jalan terbaik untuk memahami dan menjabarkan keyakinan dan perubahan kebijakan ketika ada ketidaksepakatan tujuan dan sengketa yang melibatkan beberapa aktor dari beberapa tingkat pemerintahan, kelompok kepentingan, lembaga/instansi (Hoppe dan Peterse 1993).

Dari hasil penelitian implementasi Program Keluarga Harapan jumlah tingkat pendidikan pada anak penerima PKH, masih banyak anak kelompok pendapatan terendah yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke tingkat SMP, di setiap kelompok usia sekolah, jumlah anak pada kelompok pendapatan terendah yang tidak berada di sekolah (tidak pernah sekolah dan DO) adalah yang terbanyak.

Tabel 1
Jumlah Komponen Pendidikan pada penerima Program Keluarga Harapan

NO	Komponen Pendidikan	Jumlah anak usia pendidikan (Wajib Belajar 9 tahun)	Tidak sekolah	Putus pendidikan
1	Non Komponen	567	567	212
2	Komponen SD	2450	743	567
3	Komponen SMP	1478	468	245
5	Komponen SMA	956	334	217

Sumber; Data Temporary PKH Kota Makassar (2021)

Dari tabel di atas jumlah anak keluarga penerima manfaat (KPM) pada tingkat SD sebanyak 743 anak yang dikategorikan usia anak sekolah tidak mendapatkan haknya, begitupun anak yang putus sekolah sebanyak 567 anak. Dilihat dari data di atas, menjadi hal penting untuk jadi perhatian pemerintah, aktor aktor yang terlibat di dalamnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oleh karena itu pembelaan dan perlindungan menjadi ponit penting dalam hal tersebut.

Pembelaan

Pentingnya pengetahuan para aktor sangat berkaitan dengan konteks pembelaan yang sangat luas yaitu hubungan pengetahuan

dalam pembelaan kebijakan (Pawson, 2006; Carden, 2009; Cartwright dan Hardie, 2012). Penggambaran yang paling umum dari proses “pembelaan-menjadi-kebijakan” Pembuatan kebijakan terkait erat dengan implementasi kebijakan. Dalam berbagai tinjauan literatur mengenai implementasi kebijakan, Najam (1995) menyatakan bahwa kebijakan dibuat di tempat kekuasaan berada (bisa di tingkat nasional, provinsi atau lokal). Dan kebijakan kebijakan ini sering diterapkan pada tingkat lain, dalam konteks dan kondisi yang berbeda. Jadi, implementasi kebijakan adalah tentang mengelola ketegangan antara keharusan yang dimandatkan dalam suatu kebijakan, dengan sumber daya yang ada, dan dengan lingkungan tempat masyarakat yang disasar sebagai penerima manfaat kebijakan. Perumusan kebijakan pada tingkat pengambilan keputusan tertinggi, dan implementasi kebijakan di lapangan dalam pencapaian tujuan kebijakan Program Keluarga Harapan. dari salah satu tanggapan informal melalui wawancara mengenai pembelaan aktor yang berkepentingan terhadap keluarga penerima manfaat yang memiliki permasalahan dirana pendidikan, kesehatan

Tabel 2
Pembelaan

Pembelaan	Pemerintah	SDM PKH	KPM
	Pelayanan pendampingan	Proses pendampingan	Penerima kebijakan

Sumber: UPT PKH Kota Makassar (2021)

Dalam pelaksanaan program keluarga harapan, tidak lepas dari permasalahan yang sering terjadi pada keluarga penerima manfaat, aktor yang terlibat harus berhadapan dengan sistem politik dalam rangka menjamin kebutuhan sering kali terjadi KPM dalam melaksanakan tujuan dan fungsi sebagai aktor yang berkepentingan. Peran pembela atau advokasi merupakan salah satu praktek aktor yang bersentuhan dengan kegiatan politik. Pada pembelaan ini dilakukan secara kelompok yang secara ideal hubungan antara pendamping/aktor yang berkepentingan dan penerima manfaat, adalah inisiator yang

datang dari pemerintah atas dasar tanggung jawab bersama dalam mensejahterakan seluruh komponen keluarga penerima manfaat tidak hanya di bidang pendidikan dan kesehatan. Nyatanya, dalam kehidupan sehari-hari. hidup terjadi kasus atau masalah yang sifatnya manifes (nampak) dan struktural. Misalnya, penggusuran tanah, PHK buruh, dan Intimidasi massa serta kekerasan dalam rumah tangga biasanya.

Perlindungan

Perlu kita ketahui bahwa perlindungan merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup dari suatu lembaga/organisasi untuk implementasi pencapaian sasaran atau tujuan yang tentunya berperan aktif, tanggung jawab aktor yang berkepentingan terhadap keluarga penerima manfaat didukung oleh hukum, yang memberikan legitimasi kepada aktor yang berkepentingan untuk menjadi pelindung terhadap keluarga penerima manfaat yang lemah dan rentan dalam melakukan perlindungan, tentunya aktor yang berkepentingan bertindak berdasarkan kepentingan yang terjadi karena tujuan dan keinginan target sasaran bisa tercapai dengan baik meski harus melaksanakan strategi-strategi dengan ketentuan yang ada. Oleh karena itu dilihat juga dari tanggapan Keluarga Penerima Manfaat bahwa ia sangat bersyukur menikmati kebijakan kebijakan pemerintah terutama yang paling diutamakan penerima Program Keluarga Harapan.

Tabel 3
Perlindungan

Perlindungan	Pemerintah	SDM PKH	KPM
	Pelayanan pendampingan	Proses pendampingan/ hubungan baik	Penerima kebijakan

Sumber: UPT PKH Kota Makassar (2021)

Pada penelitian ini, pelayanan yang diberikan pada pemerintah/atau instansi yang terkait bahwa segala pemberdayaan/pendampingan tidak bisa dilakukan tanpa adanya strategi perencanaan pelayanan pendampingan yang jelas memfasilitasi dan memotivasi KPM.

Dalam rangka menjalin hubungan baik aktor yang berkepentingan minimal satu bulan setelah realisasi program harus mengunjungi keluarga penerima manfaat. Kunjungan selanjutnya tergantung pada kualitas partisipasi yang dilakukan oleh aktor. Apabila terdapat kecenderungan yang memburuk, maka aktor yang berkepentingan harus sering mengunjungi KPM bersama aktor aktor lainnya yang berkepentingan dalam perwujudan pelaksanaan tanggung jawab.

Tabel diatas mejelaskan bahwa hasil penelitian jaringan implementasi Program Keluarga Harapan di Kota Makassar masih banyak anak yang seharusnya wajib belajar 9 tahun, tidak memanfaatkan dengan baik kebijakan pemerintah yang dibuat, oleh karena menjadi tugas penting bagi aktor yang berkepentingan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi pada keluarga penerima manfaat dalam melakukan pendampingan.

Tabel 4**Coalition (Koalisi) Analisi Jaringan Implementasi Program Keluarga Harapan di Kota Makassar**

Dimensi	Sub Dimensi	Tanggapan Informan		
		Pemerintah	SDM PKH	KPM
Coalition (Koalisi)	Pembelaan	Berperan aktif	Berperan aktif	Berperan aktif
	Pelindungan	Berperan aktif	Berperan aktif	Berperan aktif

Sumber: Hasil Reduksi Data, 2021 wawancara Penelitian

Dari hasil reduksi data memperlihatkan bahwa koalisi advokasi yang terjadi dalam pelaksanaan antar jaringan kelembagaan/instansi implementasi Program Keluarga Harapan dikota makassar menunjukkan dalam memecahkan atau menyelesaikan permasalahan permasalahan yang terjadi bisa dikatakan semua yang terkait berperan aktif hal itu dalam menyelesaikan permasalahan, pengetahuan yang dimiliki oleh para aktor yang berkepentingan dapat merajukkan/menghasilkan harapan dalam pembelaan dan perlindungan yang baik dalam pencapaian tujuan target/sasaran Program Keluarga Harapan di Kota Makassar.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa teori *Discourse Communication Analysis Network*, dapat digunakan ilmu administrasi publik yang membahas mengenai jaringan implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan, dilihat dari dimensi dimensi yang digunakan dalam penelitian Philip Leifeld, (2019) dan diterapkan dalam *Coalition* (Koalisi) koalisi advokasi yang sering terjadi dalam forum kerja sama dapat diselesaikan dengan baik ketika latar belakang pengetahuan aktor aktor yang berkepetingan berkompeten dan pembelaan dan perlindungan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga menghasilkan strategi-strategi salah satu proses mempengaruhi satu dengan yang lain dalam pemecahan masalah terutama lingkup permasalahan pendidikan dan kesehatan yang terjadi sehingga bisa dikatakan berkompeten dalam pencapaian tujuan.

REFERENSI

- Abzianidz Nino. (2020). "Us vs. Them as Structural Equivalence: Analysing Nationalist Discourse Networks in the Georgian Print Media". Department of Political Science, Central European University, 1051 Budapest, Hungary. *Jurnal Politics and Governance*, 8(2), 243–256.
- Iwi & Rulinawaty. (2014). "Bureaucratical System Vs People Empowerment Policy: Empirical Evidence From Cocoa Farmer Empowerment Policy in South Sulawesi Province, Indonesia." *Journal of Humanities and Social Sciences Review*.
- Alwi dan Suratman. (2009). "Analisis Antar Jaringan Organisasi Pelayanan Publik yang Demokratis (Studi Kasus Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Kota di Kota Makassar" *Laporan Penelitian Hibah Pasca*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Hasanuddin, Makassar.

- Bogason Peter And Theo A.J. Toonen. (1998). "Introduction: Networks in Public Administration" Blackwell Publishers Ltd. 1998, 108 Cowley Road, Oxford ox4 1jf, uk and 350 Main Street, Malden, ma 02148, Usa. *Public Administration* 76, 205–227.
- Bhattacharya Caroline. (2020). "Gatekeeping the Plenary Floor: Discourse Network Analysis as a Novel Approach to Party Control". Department of Political and Economic Studies, University of Helsinki. *Jurnal Politics and Governance* 8(2), 229–242.
- Christopher Koliba Jack W. Meek Asim Zia. (2010). *Governance Networks in Public Administration and Public Policy*". Crc Press is an Imprint of Taylor & Francis.
- Compston Hugh. (2009). "Jaringan Kebijakan dan Perubahan Kebijakan Menguji Teori Jaringan Kebijakan". Palgrave Macmillan di AS adalah Divisi dari St Martin's Press LLC, 175 Fifth Avenue, New York, NY 10010.
- Chilton Pau. (2004). "Analysing Political Discourse Theory and Practice" This edition Published in the Taylor & Francis e-Library.
- Kukkonen Anna and Tuomas Ylä-Anttila. (2020). "The Science–Policy Interface as a Discourse Network: Finland's Climate Change Policy 2002–2015". Helsinki Institute of Sustainability Science, University of Helsinki, 00014 Helsinki, Finland. *Jurnal Politics and Governance*, 8(2), 200–214.
- Leifeld Philip. (2019). "Reconceptualizing Major Policy Change in the Advocacy Coalition Framework: A Discourse Network Analysis of German Pension Politics". *The Policy Studies Journal* 41(1), 169–198.
- Suratman. (2013). "Jaringan Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Kebijakan Pengembangan kakao dikoridor sulawesi selatan." *Jurnal Kebijakan Administrasi dan Layanan Publik*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Susanti, Gita. (2012). Jaringan Pelayanan Publik yang Demokratis (Studi Kasus Penentuan Strategi Pelayanan Pendidikan Berbasis Jaringan di Kota Makassar). *Disertasi*, Makassar: Program Pascasarjana Unhas.
- Suwitri Sri. (2008). "Jejaring Kebijakan Dalam Perumusan Kebijakan Publik Suatu Kajian Tentang Perumusan Kebijakan Penanggulangan Banjir dan Rob Pemerintah Kota Semarang". *Jurnal Delegasi, Jurnal Ilmu Administrasi, STIA Banjarmasin*.